

Judul : Kebijakan DPR Tidak Sensitif Terhadap Rakyat
Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 1

Kebijakan DPR Tidak Sensitif Terhadap Rakyat



JONI ISKANDAR/ANTARA

SEJUMLAH anggota Dewan Perwakilan Rakyat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021).*

JAKARTA, (PR).-

Kebijakan fasilitas khusus isoman anggota DPR itu dikeluarkan pada momentum yang tidak tepat. Di tengah krisis pandemi Covid-19, warga juga ada yang meninggal karena faktor minimnya fasilitas isolasi mandiri (isoman). Kebijakan itu juga akan menunjukkan bahwa DPR tak sensitif dengan warga yang seharusnya mereka bantu.

"Posisi DPR adalah lembaga yang paling dekat dengan rakyat. Menjadi wakil rakyat itu ya DPR. Dan karena posisi itulah kita berharap banyak kepada DPR untuk memperjuangkan aspirasi, termasuk memperbaiki kondisi minimnya faskes dan fasilitas isoman," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus, Kamis (29/7/2021).

Lucius menilai, alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR justru malah mendahulukan fasilitas untuk kepentingan mereka sendiri. "Di situ saya kira ironi wakil rakyat. Dan kebijakan ini rasanya kontradiktif dengan situasi dan juga dengan kewenangan DPR sendiri," tuturnya.

Ia menilai, kebijakan itu juga bisa semakin menurunkan kepercayaan rakyat. Padahal, DPR pertama sekali bisa berjalan karena kepercayaan rakyat.

"Sejak awal mereka terpilih karena kepercayaan, pun hari-hari kerja mereka sangat ditentukan oleh seberapa publik percaya kepada mereka. Ketika kebijakan kontroversial ini terus dikeluarkan oleh DPR atau ditunjukkan oleh DPR, saya kira ini akan menggerogoti kepercayaan publik terhadap DPR," ujar Lucius.

Ia juga menyoroti Setjen DPR yang telah mengeluarkan

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)